

Sosialisasi Penataan Ruang dalam Mendukung Sistem Transportasi Multimoda Sulawesi Selatan

Venny Veronica Natalia^{1*}, Jayanti Mandasari Andi Munawarah Abduh, Marly Valenti Patandianan, Abdul Rachman Rasyid, Dewa Sagita Alfadin Nur Shirly Wunas, Yashinta Kumala Dewi Sutopo

Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin¹
veronicanatalia@unhas.ac.id^{1*}

Abstrak

Sistem transportasi dan guna lahan memiliki hubungan yang timbal balik. Oleh karena itu, pembangunan rel Kereta Api Trans Sulawesi akan berdampak secara signifikan pada guna lahan yang ada disekitarnya. Selain itu, adanya moda angkutan alternatif berbasis rel tentunya akan mempengaruhi permintaan pergerakan orang dan barang di masa akan datang. Oleh karena itu, diperlukan suatu koordinasi dari berbagai *stakeholder* untuk dapat mengintegrasikan pelayanan dan pengembangan angkutan berbasis kereta api dengan penataan ruang. Tujuan dari kegiatan ini adalah melakukan sosialisasi kepada *stakeholder* di bidang pengambil kebijakan dan pelaksana untuk mengintegrasikan sistem transportasi berbasis kereta api dengan penataan ruang. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sosialisasi dan diskusi partisipatif dengan *stakeholder* terkait. Luaran dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan pemahaman dan kesadaran *stakeholder* tentang pentingnya integrasi antara sistem transportasi dan guna lahan. Peningkatan jumlah peserta yang memahami pentingnya penataan ruang dalam mendukung sistem transportasi multimoda Sulawesi Selatan meningkat dari 77,25% menjadi 91% setelah sosialisasi.

Kata Kunci: Integrasi; Kereta Api Trans Sulawesi; Penataan Ruang; Sistem Transportasi; Sulawesi Selatan.

Abstract

The transportation system and land use have a reciprocal relationship. Therefore, the construction of the Trans Sulawesi railway will significantly impact the surrounding land use. Additionally, the introduction of rail-based alternative transportation modes will inevitably influence future demand for the movement of people and goods. Therefore, coordination among various stakeholders is essential to integrate rail-based transportation services and development with spatial planning. The objective of this activity is to conduct outreach to policymakers and implementers to integrate the rail-based transportation system with spatial planning. The research method employed involves participatory socialization and discussions with relevant stakeholders. The output of this activity shows an increase in stakeholder understanding and awareness of the importance of integration between transportation systems and land use. The increase in the number of participants who understand the importance of spatial planning in supporting the South Sulawesi multimodal transportation system increased from 77.52% to 91% after the socialization.

Keywords: The integration; Trans Sulawesi Railway; Spatial Plan; Transportation system; South Sulawesi.

1. Pendahuluan

Beberapa kota/kabupaten yang dilalui oleh jalur Kereta Api Trans Sulawesi belum mengakomodasi adanya pembangunan tersebut dalam berbagai kebijakan lokal, salah satunya kebijakan penataan ruang (RTRWK). Investor/masyarakat yang memiliki lahan sepanjang jalur kereta api, perlu dilibatkan dalam rencana pembangunan kedepannya. Kebijakan yang akan dilakukan secara nasional, regional dan lokal kedepannya haruslah saling melengkapi dan saling mendukung rencana pembangunan masa datang. Hal inilah yang mendasari kegiatan ini, agar setiap *stakeholder* dapat mengetahui peran masing-masing serta dapat mengkoordinasikan kebijakan dan

rencana pembangunan masing-masing sektor secara terintegrasi khususnya dalam lingkup transportasi dan penataan ruang.

Pembangunan Kereta Api Trans Sulawesi diharapkan dapat membantu meningkatkan perekonomian di Pulau Sulawesi. Kementerian Perhubungan yang diwakili oleh Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan, adalah *leading* sektor dalam kegiatan ini. Untuk mendapatkan manfaat dan keuntungan penuh atas terselenggaranya pembangunan kereta api tersebut, diperlukan kerjasama dengan berbagai pihak terkait antara lain pengambil kebijakan, pengelola/pelaksana dan investor. Saat ini pembangunan di sekitar jalur kereta api oleh investor (pengembang) bergerak sangat cepat. Disisi lain harga lahan meningkat namun beberapa kota/kabupaten belum mengalokasikan peraturan zonasi yang tepat dalam kebijakan penataan ruang skala kota/kabupaten.

Selain itu, layanan angkutan massal berbasis bus yang melayani wilayah Mamminasata dalam Provinsi Sulawesi Selatan, juga memerlukan integrasi dengan penataan ruang. Integrasi ini bermanfaat dalam memperluas cakupan pelayanan serta menata rute angkutan bus sehingga dapat melayani secara efektif dan efisien. Integrasi penataan ruang dan sistem transportasi merupakan salah satu upaya mencapai sistem transportasi berkelanjutan (Bertaud, 2002; Hall, 2015; Newman & Keworthy, 2015; Wunas, 2011). Hal-hal seperti ini perlu diperkuat dengan kegiatan sosialisasi, agar setiap pemangku kepentingan dapat memiliki visi yang sama dalam mengintegrasikan sistem transportasi dan penataan ruang di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Representasi dari sektor transportasi, khususnya dinas perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan menganggap perlu dilakukan sosialisasi untuk menyatukan persepsi terkait pengembangan layanan kereta api di masa datang serta dukungan kebijakan yang diharapkan.

2. Latar Belakang

Mengintegrasikan kebijakan pembangunan pada kota-kota di negara berkembang memiliki tantangan tersendiri (Cervero, 2013; Natalia, Nieland, Goletz, 2023). Mengintegrasikan sistem transportasi dan guna lahan memerlukan harmonisasi sistem kelembagaan. Integrasi dapat dicapai dengan visi yang komprehensif (Lee, 2020; Powel dkk, 2021; Pradan, dkk, 2024). Beberapa studi menguraikan berbagai model koordinasi seperti *coordinative umbrella organization* yang berperan dalam koordinasi dalam mencapai transportasi berkelanjutan (Mu & de Jong, 2016; ITF, 2023), *project based coordination* (Curtis & James, 2010), *policy based coordination* (Waddell, 2014), dan *Metropolitan Agency* (KIAT, 2020). Penerapan masing-masing model memerlukan adaptasi sesuai karakteristik kelembagaan dari masing-masing wilayah.

Sistem transportasi dan guna lahan memiliki hubungan yang timbal balik. Salah satu komponen dari upaya mencapai kota berkelanjutan adalah dengan mengintegrasikan guna lahan dan transportasi. Menurut Malik (2024) pengelolaan transportasi publik perlu diintegrasikan dengan penataan ruang. Pembangunan rel Kereta Api Trans Sulawesi akan berdampak pada guna lahan yang ada disekitarnya. Selain itu, adanya moda angkutan alternatif berbasis rel tentunya akan mempengaruhi permintaan pergerakan orang dan barang di masa akan datang. Oleh karena itu perlunya koordinasi dari setiap *stakeholder* untuk mencapai manfaat positif dari pembangunan ini.

Sejak adanya undang-undang otonomi daerah dari tahun 1999, pemerintah kota/kabupaten memiliki kewenangan untuk mengelola wilayahnya. Namun, disisi lain terdapat komponen-komponen pembangunan yang tidak bisa hanya diselesaikan oleh satu pemerintah kota/kabupaten,

seperti penyediaan infrastruktur transportasi. Menurut Kusumaputra (2024), penyediaan transprotasi massal perkotaan di Kota Metropolitan Jabodetabek tidak hanya membangun infrastruktur transprotasi kota modern tetapi juga membangun kulur baru yang perlu didukung oleh barbagai kebijakan dan kelembagaan yang sistematis dan terintegrasi. Permasalahan kemacetan lalu lintas pada Kota Metropolitan Mamminasata di Sulawesi Selatan juga memerlukan penanganan secara komprehensif (Ramli dkk, 2024)

Seperti yang terjadi di Sulawesi Selatan, pembangunan Kereta Api Trans Sulawesi melintasi 5 wilayah pemerintah kota/kabupaten dan satu wilayah pemerintah provinsi selain itu proyek pembangunan jalur kereta api ini juga dalam otoritas pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan. Menurut Patandianan dkk (2024), layanan kereta api memungkinkan terbukanya aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah khususnya di wilayah Sulawesi Selatan. Selanjutnya, layanan angkutan massal berbasis bus, juga melintasi beberapa kota/kabupaten di dalam Provinsi Sulawesi Selatan. Setiap pemangku kepentingan yang terlibat perlu memahami peran masing-masing agar tetap selaras dengan rencana pembangunan masa datang. Sosialisasi dan koordinasi yang terus-menerus menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menyelaraskan program antar sektor dan pemangku kepentingan. Di sisi lain, sering kali terjadi hambatan dan tantangan dalam menyelaraskan program pembangunan antar sektor, karena masing-masing sektor belum mengetahui secara detail peran masing-masing dalam rencana pembangunan secara komprehensif.

Salah satu prinsip dalam pembangunan berkelanjutan adalah terintegrasi sistem transportasi dan penataan ruang. Integrasi antar sektor hanya dapat dicapai jika sumber daya manusia (SDM) yang terlibat mengetahui peran masing-masing.

3. Metode

3.1 Target Capaian

Target capaian kegiatan ini adalah memberikan sosialisasi kepada setiap pemangku kepentingan terkait integrasi sistem transportasi dan penataan ruang di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

3.2 Implementasi Kegiatan

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan di Kota Makassar tepatnya di kantor Dinas Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 28 Agustus 2024. Peserta adalah wakil dari instansi terkait sektor transportasi, penataan ruang, pembangunan daerah, dan sektor swasta.

3.3 Materi Kegiatan

Materi yang disampaikan pada kegiatan ini adalah hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penataan ruang dan transportasi, antara lain modal *split*, tren pergerakan penduduk kota Makassar, keterkaitan kelembagaan dan pengembangan sistem transportasi.

3.4 Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini terdiri atas beberapa prosedur yang terdiri atas tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan. Tahapan persiapan dimulai dengan melakukan pembentukan tim dan menentukan penentuan tema penelitian, lokasi penelitian serta waktu penelitian. Setelah itu, tim melakukan koordinasi dengan mitra terkait sebelum dilakukan kegiatan sosialisasi.

Adapun tahapan pelaksanaan atau kegiatan sosialisasi ini Kegiatan sosialisasi diawali dengan melakukan *pre-test* dengan menyebarluaskan kuisioner untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta

terkait koordinasi antar lembaga, potensi dan kendala yang dihadapi dalam koordinasi kegiatan dan kebijakan serta saran/rekomendasi untuk koordinasi kelembagaan dan kebijakan dalam memandukan sistem transprotasi dan kebijakan. Kegiatan sosialisasi juga membuka kesempatan untuk diskusi sehingga dapat dicapai persamaan persepsi antar *stakeholder* untuk mencapai sistem transportasi yang terintegrasi dengan penataan ruang. Setelah itu, anggota tim kembali menyebarkan kuesioner *post-test* kepada peserta.

4. Hasil dan Diskusi

Kegiatan sosialisasi diawali dengan presentasi hasil-hasil penelitian yang dapat mendukung tercapainya integrasi layanan transportasi dan penataan ruang. Kegiatan sosialisasi dihadiri oleh 30 peserta (Gambar 1). Peserta adalah wakil dari Dinas Perhubungan kota/kabupaten dalam wilayah Mamminasata (Makassar, Maros, Takalar dan Gowa), Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan, Bapelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, Balai Kereta Api, dan Balai Pengelola Transportasi Darat. Sesi diskusi dan tanya jawab dimanfaatkan untuk mengukur pemahaman peserta.



Gambar 1. Foto Kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi

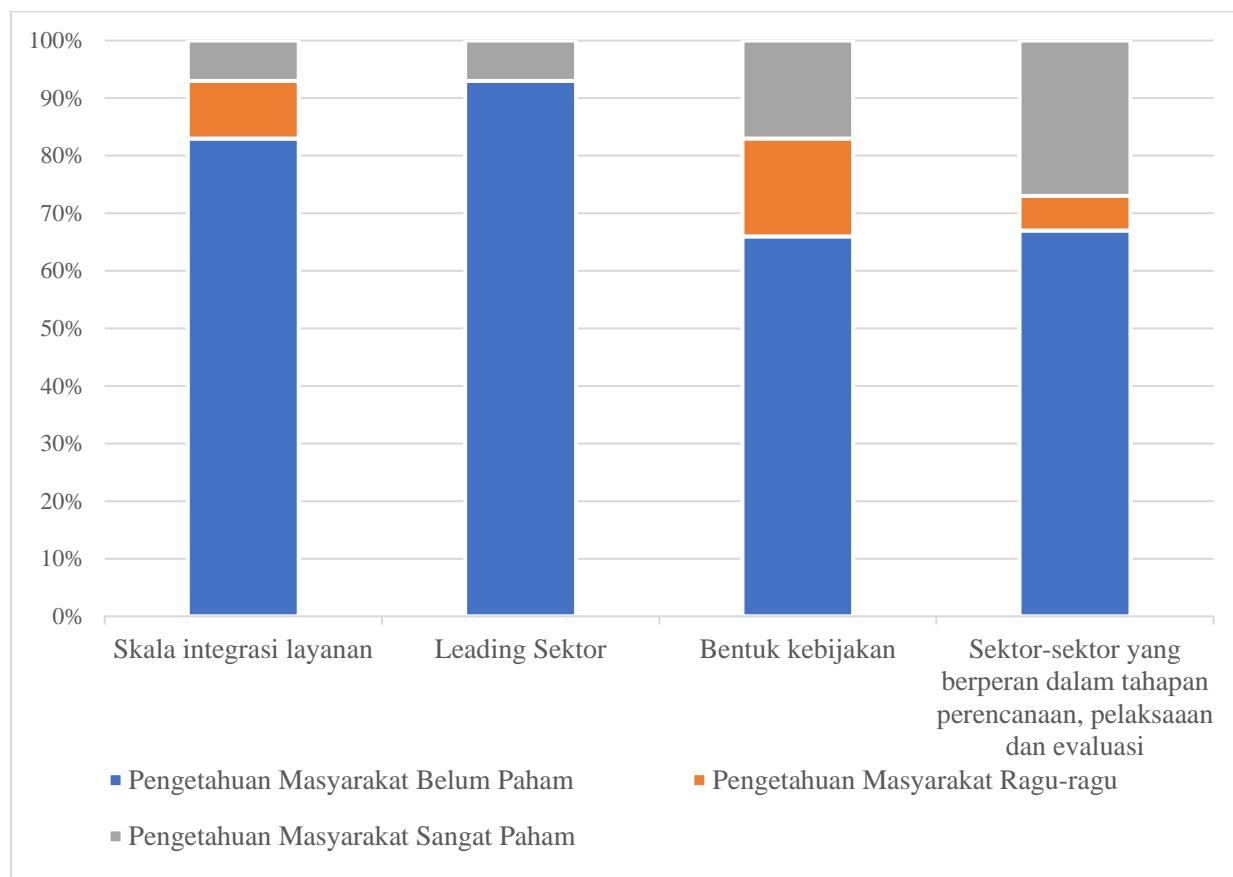
Kegiatan sosialisasi yang dilakukan bertujuan mengukur 4 hal terkait pemahaman peserta terkait integrasi transportasi dan penataan ruang. Keempat hal tersebut adalah 1) skala integrasi layanan (Kota/Kab, Provinsi, Nasional), 2) *Leading Sektor*; 3) Bentuk kebijakan; 4) Sektor-sektor yang berperan dalam tahapan perencanaan, pelaksaaan dan evaluasi.

Hasil observasi awal sebelum dilakukan kegiatan sosialisasi menunjukkan bahwa sebagian besar peserta belum memahami keempat hal yang diukur (Tabel 1). Sebagian besar berpendapat bahwa skala integrasi perlu dilakukan di level nasional seperti yang ada saat ini. Seharusnya integrasi layanan dapat dilakukan di skala provinsi meskipun dalam pelaksanaannya tetap melibatkan otoritas di skala nasional dan kota kabupaten.

Tabel 1. Hasil Evaluasi Awal tentang Pemahaman Peserta terhadap Materi Sosialisasi

Aspek Penilaian	Pengetahuan Masyarakat		
	Belum Paham	Ragu-ragu	Sangat Paham
Skala integrasi layanan	83%	10%	7%
Leading Sektor	93%	0	7%
Bentuk kebijakan	66%	17%	17%
Sektor-sektor yang berperan dalam tahapan perencanaan, pelaksaaan dan evaluasi	67%	6%	27%

Secara umum peserta juga belum memahami kebijakan-kebijakan apa saja yang perlu dirumuskan untuk mengintegrasikan sistem transportasi dan penataan ruang. Persentase tingkat pemahaman peserta menunjukkan bahwa terdapat 77,25% yang belum memahami, 8,25% ragu-ragu dan 14,5% yang telah memahami. Berikut digambarkan dalam diagram dibawah ini (Gambar 2).



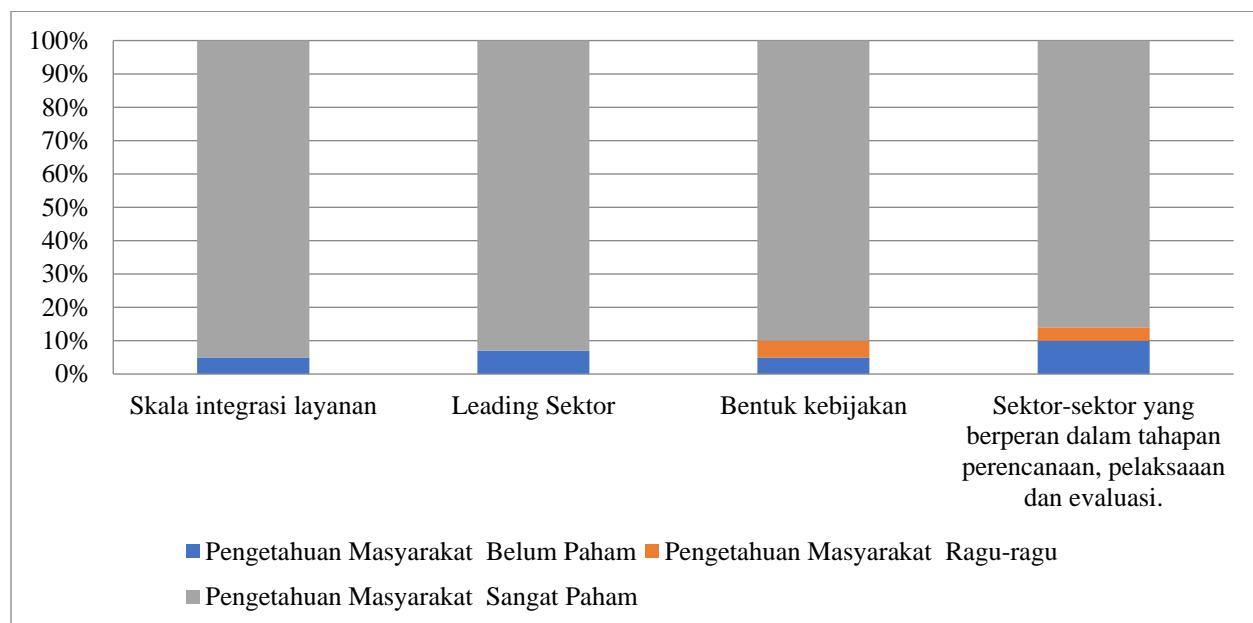
Gambar 2. Persentase Tingkat Pemahaman Peserta Sebelum dilakukan Kegiatan Sosialisasi

Setelah dilakukan sosialisasi, diskusi menunjukkan bahwa ada tantangan dalam dukungan kebijakan, proses koordinasi program dan anggaran antar sektor dalam upaya mengintegrasikan sistem transportasi dan penataan ruang. Secara detail hasil pengukuran setelah sosialisasi dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Evaluasi Akhir tentang Pemahaman Peserta terhadap Materi Sosialisasi

Aspek Penilaian	Pengetahuan Masyarakat		
	Belum Paham	Ragu-ragu	Sangat Paham
Skala integrasi layanan	5%	0	95%
Leading Sektor	7%	0	93%
Bentuk kebijakan	5%	5%	90%
Sektor-sektor yang berperan dalam tahapan perencanaan, pelaksaaan dan evaluasi.	10%	4%	86%

Setelah dilakukan kegiatan sosialisasi, persentase rata-rata tingkat pemahaman peserta menunjukkan bahwa terdapat 91% yang telah memahami; 2,3% ragu-ragu dan 6,7% yang masih belum memahami (Gambar 3). Berikut digambarkan dalam diagram dibawah ini:



Gambar 3. Persentase Tingkat Pemahaman Peserta Setelah dilakukan Kegiatan Sosialisasi

Hasil sosialisasi juga menunjukkan bahwa, selalu terjadi pergeseran SDM disetiap dinas/sektor dalam lingkup ini, sehingga program seringkali terputus atau tidak berlanjut karena ketidakpahaman SDM. Selain itu, tantangan besar adalah *political will* dari kepala daerah yang seringkali berubah setiap periode masa jabatan sehingga seringkali proyek dan kegiatan yang diusulkan tiap sektor tidak berlanjut. Secara ideal, setiap usulan kegiatan atau penganggaran untuk mengintegrasikan sistem transportasi dan penataan ruang sudah seharusnya berbasis program, sehingga dapat terus berlanjut meskipun ada perubahan sdm dan pergantian kepala daerah.

5. Kesimpulan

Hasil kegiatan sosialisasi menunjukkan bahwa SDM yang sebelumnya belum memahami (77,52%) tentang pentingnya integrasi penataan ruang dan sistem transportasi, setelah sosialisasi menjadi paham (91%). Mengingat SDM yang bergerak dalam sektor seringkali mengalami perubahan. Hal ini menyebabkan program seringkali tertunda atau tidak berlanjut. Oleh karena itu

kegiatan sosialisasi perlu terus dilakukan. Selain itu peningkatan pemahaman SDM disektor terkait perlu didukung dengan kegiatan pelatihan yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Pada akhirnya, perlu disusun kerangka kerja dan kebijakan dalam mengkoordinasikan sektor-sektor yang terlibat dalam integrasi sistem transportasi dan penataan ruang.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih kepada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan beserta jajarannya, Balai pengelola Kereta Api (BPKA) Sulawesi Selatan, Balai Pengelola Transportasi darat (BPTD) Sulawesi selatan dan BAPPELITBANGDA Provinsi Sulawesi Selatan sebagai mitra dalam kegiatan pengabdian ini. Ucapan terima kasih juga diberikan kepada Dekan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin atas dukungan dana melalui skema Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2024.

Daftar Pustaka

- Bertaud, A. (2002). Note on transportation and urban spatial structure. Washington, ABCDE Conference.
- Cervero, R. (2013). Linking urban transport and land use in developing countries. *Journal of Transport and Land Use*. Vol 6.No.1, 7-24. DOI: <https://doi.org/10.5198/jtlu.v6i1.425>
- Curtis, C., & James, B. 2010. An Institutional model for Land use and Transport Integration. *Urban policy and Research*, Vol 22, Issue 3.
- Hall, T. (2015). *The Robust City*. Routledge, Taylor and Francis Group. London and New York.
- ITF. (2023), "ITF Transport Outlook 2023: Summary", OECD Publishing, Paris.
- Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur (KIAT). (2020). *Sustainable Urbam Mobility Plan*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Kusumaputra, R.A. (2024). *Membangun MRT: Pengalaman Kepemimpinan William Sabandar*. Pustaka KSP Kreatif. Jakarta.
- Lee, J.(2020). *Reflecting on an Integrated Approach for Transport and Spatial Planning as a Pathway to Sustainable Urbanization*. Sustainability.
- Mu, R. & de Jong, M. (2016). A Network Governance Approach to Transit-Oriented Development: Integrating Urban Transport and Land Use Policies in Urumqi, China. *Transport Policy*, Vol 53, pp 55-63.
- Malik, I. IB. (2024). *Manajemen Transprotasi Publik dan Tata Kota*. Yayasan Pusat Studi Kota dan Daerah, Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Bandar Lampung.
- Natalia, V.V., Nieland, S. Goletz., M. (2023). Quantitative and qualitative approaches in recognizing viable centres to support transit system implementation in developing countries. Case study: Makassar, Indonesia. *Case Studies on Transport Policy*. Vol 12.
- Newman, P., & Kenworthy, J. (2015). *The End of Automobile Dependence: How Cities Are Moving Beyond Car-base Planning*. Island Press. Washington D.C
- Patandianan, MV., dkk. (2024). Sosialisasi Aksesibilitas dan Konektivitas Stasiun Kereta Api di Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan. *Jurnal Tepat*.
- Powel, S. dkk.(2021). Net Zero Transport: the role of spatial planning and place-based solutions. Royal Town Planning Institute (RTPI).
- Pradan, R. dkk.(2024). *Institutional Quality, ICT Infrastructure, Transportation, and Sustainable Development: The Case of Lower Income Countries*. Springer.
- Ramli, M.I. dkk. (2024). Aplikasi Program Visum untuk Analisis Estimasi Pembebanan Jaringan Jalan di Kota Sungguminasa Kabupaten Gowa. *Jurnal Tepat*.

Waddell, P. (2014). *Integrated land Use and Transportation Planning and Modelling: Addressing Challenges in Research Practice*. Ins Brommelstroed & Bertolini (2016). Transport Model in Urban Planning Practices. Routledge. London.

Wunas, S. (2011). *Kota Humanis: Integrasi Guna Lahan dan Transportasi di Wilayah Suburban Brilian internasional*. Surabaya